

**PERAN PARLOK DALAM MEMPERKUAT SISTEM
DEMOKRASI (Analisis Terhadap Keterwakilan Parlok
di Provinsi Aceh 2019)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MHD. QIFAFAN

NIM. 160801088

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY-BANDA ACEH
2022M/1443 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah satu beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Politik



Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A.
NIP: 196407051996031001

Aklima, S.FiLL, M.A.
NIP: 198810062019032009

**PERAN PARLOK DALAM MEMPERKUAT SISTEM
DEMOKRASI (Analisis Terhadap Keterwakilan Parlok
di Provinsi Aceh 2019)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal: 13 Januari 2022 M
Kamis, 11 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Abdullah Sami, Lc., M.A
NIP. 196407051996031001

Aklima, S.Fil.I., M.A
NIP. 198810062019032009

Penguji I,

Penguji II,

Eka Januar, M. Soc, Sc
NIP:198401012015031003

Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc
NIDN: 2008048903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum
NIP:197307232000032002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD. Qifafan

NIM : 160801088

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjan di suatu perguruan tinggi dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai sumber kutipan dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 30-Desember-2021.

Saya yang menyatakan,



MHD. Qifafan

NIM: 160801088

ABSTRAK

Nama : MHD. Qifafan
NIM : 160801088
Fak/Jur : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik
Judul : Peran Parlok Dalam Memperkuat Sistem Demokrasi
(Analisis Terhadap Keterwakilan Parlok Di Provinsi
Aceh 2019)
Pembimbing I : Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A
Pembimbing II : Aklima, S.Fil.I., M.A

Partai politik memiliki peran sentral untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Salah satu perkembangan tatanan kepartaian di Indonesia yaitu kehadiran partai politik lokal. Keberadaan parlok menjadi peran penting dalam membangun pilar-pilar demokrasi di wilayah Aceh pasca perdamaian *MoU-Helsinki*. Bahkan kehadiran parlok dapat mengantarkan keterwakilannya di legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan peran partai politik lokal dalam memperkuat sistem demokrasi di Aceh serta prospek ke depan partai politik lokal dalam membangun dan menyerap aspirasi dari masyarakat Aceh. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*, dengan memperoleh data melalui wawancara, kajian pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan peran partai politik lokal dalam menguatkan sistem demokrasi di Aceh secara legalitas diatur keberadaannya dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 75 dan dirumuskan dalam bentuk PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh sehingga menguatkan kedudukan partai politik lokal di Aceh. Kehadiran partai lokal di Aceh mampu mendorong dan memperkuat demokrasi Aceh menjadi terbuka dan transparan. Sehingga peran partai lokal mampu mewarnai perpolitikan di Aceh dan memperkuat sistem pemilu di Indonesia dengan mengikuti Pemilu dan pilkada di Aceh. Prospek ke depan partai politik lokal dalam membangun dan menyerap aspirasi dari masyarakat Aceh dapat dilihat dari dua sisi. Pertama; melalui tantangan yang dihadapi partai lokal di Aceh. Kedua; prospek partai lokal berupaya dapat memenangkan pemilu untuk bisa menguasai legislatif dan eksekutif. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peran parlok di Aceh dapat memperkuat demokrasi Aceh sehingga keterwakilan parlok dapat mengambil peran baik di legislatif maupun di eksekutif.

Kata Kunci: Partai politik lokal, sistem demokrasi, Pemilu 2019, Aceh

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Peran Parlok Dalam Memperkuat Sistem Demokrasi (Analisis Terhadap Keterwakilan Parlok di Provinsi Aceh 2019)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Kasman dan Ibunda tercinta Malasari yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis.

2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A selaku ketua prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A sebagai pembimbing I, dan Ibu Aklima, S.Fil.I., M.A sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Aklima, S.Fil.I., M.A sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan.
6. Bapak/Ibu selaku Dosen dan karyawan Fakultas Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan prodi Ilmu Politik.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 30 Desember 2021.

Penulis,

Mhd. Qifafan

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Literatur Review	10
BAB DUA: KEBERADAAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA	
2.1. Pengertian Partai Politik	14
2.2. Partai Politik Lokal di Aceh.....	17
2.3. Demokrasi di Indonesia	19
2.3.1. Pengertian Demokrasi	19
2.3.2. Model-Model Demokrasi.....	23
2.3.3. Sistem-Sistem Demokrasi.....	29
2.4. Pengertian Pemilihan Umum.....	31
BAB TIGA: METODELOGI PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian	35
3.1.1. Metode Penelitian dan Pendekatan	35
3.1.2. Jenis Penelitian	35
3.2. Fokus Penelitian	36
3.3. Lokasi Penelitian.....	36
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5. Informan Penelitian	38

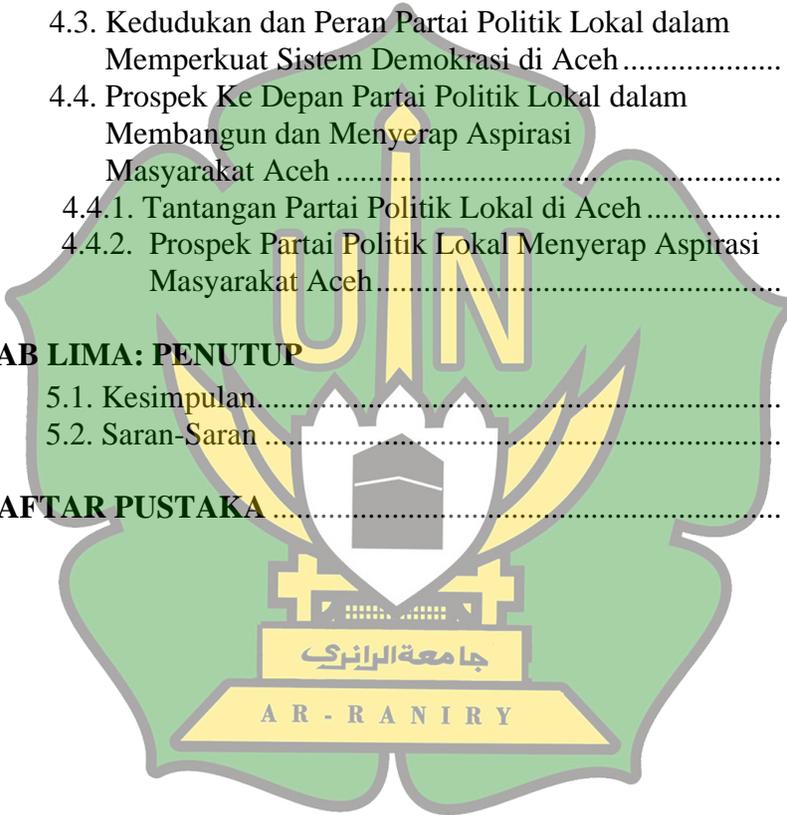
BAB EMPAT: HASIL PENELITIAN

4.1. Sejarah Lahirnya Partai Lokal di Aceh.....	39
4.1.1. Gambaran Umum Partai PA	43
4.1.2. Gambaran Umum Partai SIRA	45
4.1.3. Gambaran Umum Partai PDA	46
4.1.4. Gambaran Umum Partai PNA	49
4.2. Eksistensi Partai Lokal di Aceh.....	51
4.3. Kedudukan dan Peran Partai Politik Lokal dalam Memperkuat Sistem Demokrasi di Aceh	57
4.4. Prospek Ke Depan Partai Politik Lokal dalam Membangun dan Menyerap Aspirasi Masyarakat Aceh	60
4.4.1. Tantangan Partai Politik Lokal di Aceh	60
4.4.2. Prospek Partai Politik Lokal Menyerap Aspirasi Masyarakat Aceh.....	64

BAB LIMA: PENUTUP

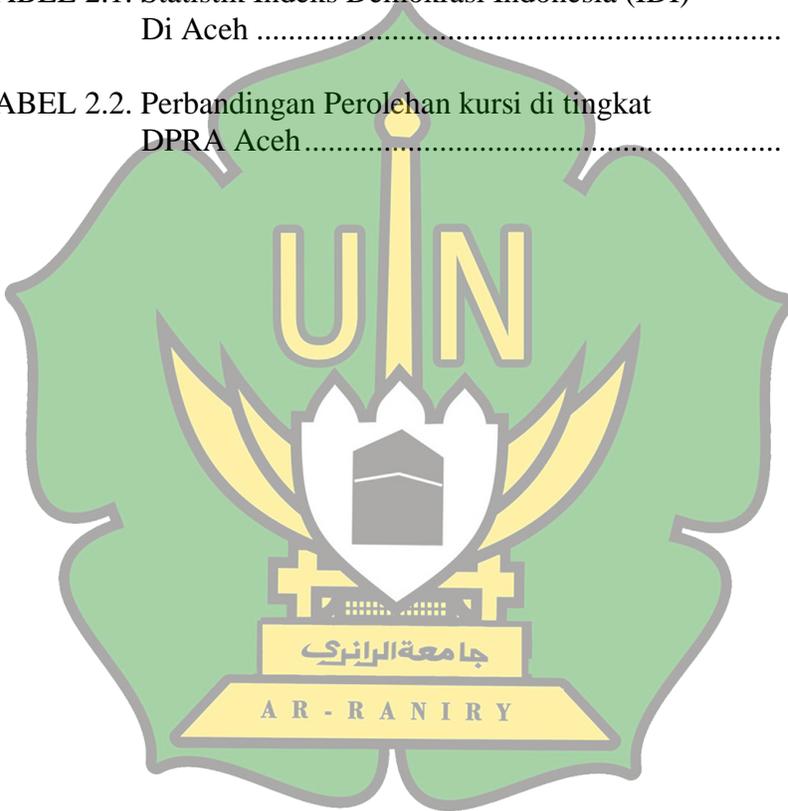
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran-Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	----



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1. Perolehan suara hasil pemilu tingkat Provinsi Aceh dari periode 2009 sampai pemilu 2019-2024.....	5
TABEL 2.1. Statistik Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Di Aceh	52
TABEL 2.2. Perbandingan Perolehan kursi di tingkat DPRA Aceh.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

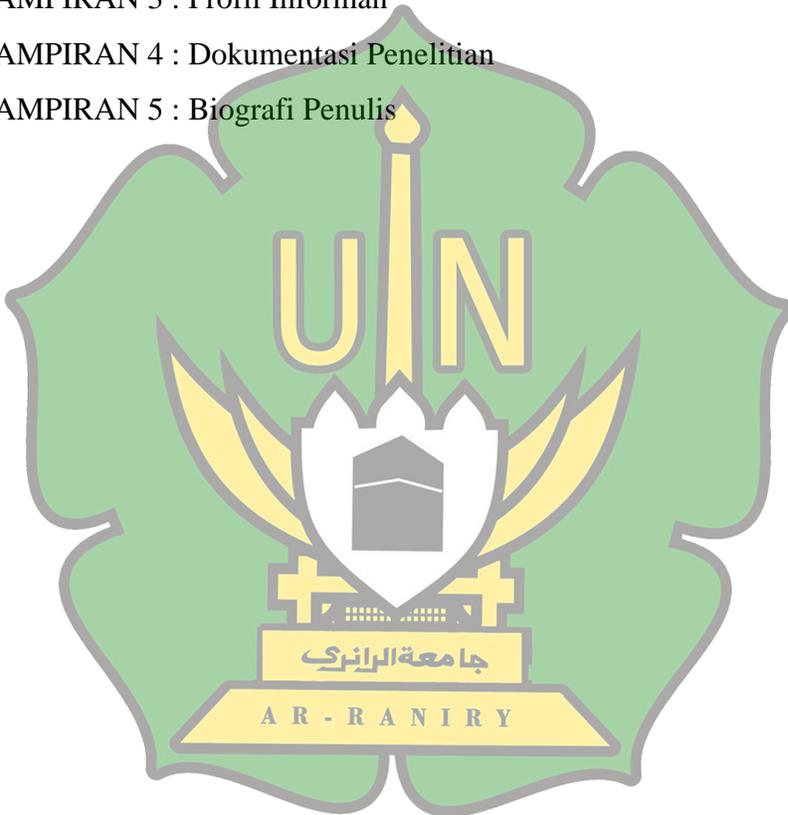
LAMPIRAN 1 : Instrumen Penelitian

LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian

LAMPIRAN 3 : Profil Informan

LAMPIRAN 4 : Dokumentasi Penelitian

LAMPIRAN 5 : Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan salah satu elemen penting untuk konsolidasi demokrasi yang sehat dan substantif karena kualitas partai politik akan berpengaruh dalam menentukan keterwakilan dan akuntabilitas politik. Partai politik memiliki peran sentral untuk menyalurkan aspirasi masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara, atau dengan kata lain partai politik juga memainkan peran sebagai penghubung yang strategis antara pemerintah dengan warga negara. Selain itu peran fundamental lainnya yang dijalankan partai politik adalah karena secara formal hanya partai politik yang diakui dan diatur secara sah sebagai lembaga yang berfungsi menciptakan wakil rakyat di pemerintahan.¹

Partai politik itu salah satu pilar dari demokrasi yang memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik merupakan bentuk dari partisipasi politik masyarakat secara langsung dengan melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan politik. Demokrasi tanpa partai politik akan kehilangan maknanya, sehingga partai politik menjadi instrumen penting dalam demokrasi.²

¹ A. Malik Haramain dan M.F. Nurhuda, *Mengawal Transisi: Refleksi Atas Pemantauan Pemilu 1999*, (Jakarta: Kerja Sama dengan UNDP dan JAMPPPI, 2000), hlm. 211.

² Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 18.

Di bawah sistem politik modern, pemilihan umum (pemilu) merupakan salah syarat mutlak, suatu *conditio sine qua non*, bagi terselenggaranya pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterwakilan, sehingga dikatakan pemilu merupakan bagian yang penting dari konsolidasi demokrasi. Oleh karenanya esensi konsolidasi demokrasi adalah legitimasi dan pemilu merupakan satu-satunya jalan bagi pemerintah demokratis untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat. Dengan kata lain, pemilu akan menghasilkan pemerintah yang diabsahkan dan diakui bersama oleh rakyat yang membentuknya.³

Keberadaan partai politik semakin penting karena demokrasi mensyaratkan wewenang warga untuk memerintah dan menjadi bagian dari hak warga berpartisipasi menentukan kebijakan publik dan pemimpin. Tetapi partai politik dibuat tidak hanya untuk memerintah. Partai politik juga untuk menyalurkan *collective will* merepresentasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat.⁴

Begitu pentingnya Partai Politik, sehingga diasumsikan bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai politik, pernyataan ini cukup sering dikemukakan. hal ini di dasari oleh fakta bahwa institusi partai politik adalah salah satu pilar penting bangunan sistem

³ Tommi A. Legowo, *Pemilu 2009, Konsolidasi Demokrasi dan Perwakilan Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 77-78.

⁴ Efriza, *Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik*, *Jurnal Politica*, Vol. 10 No. 1 Mei 2019, Jurnal.dpr.go.id, hlm. 26.

demokrasi selain institusi pemilu, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pers yang bebas.⁵

Partai politik pada awalnya dibentuk atas dasar keinginan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Berangkat dari hal tersebut, dapat diuraikan bahwa partai politik merupakan kelompok terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dalam bentuk program yang akan dilaksanakannya dengan cara konstitusional untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.⁶

Salah satu perkembangan terbaru dalam tatanan kepartaian di Indonesia adalah kehadiran dan keberadaan partai politik lokal. Keberadaan partai politik lokal itu sendiri tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, selanjutnya disebut UUPA. Sebagai langkah awal proses rekonsiliasi pasca *MoU, Aceh Monitoring Mission* (AMM) meminta GAM untuk membubarkan struktur keorganisasiannya agar menghilangkan kesan “*separatism*” dari mantan anggota GAM.⁷

⁵ Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 45.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 404.

⁷ M. Hamdan Basyar, *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 36-37.

Setelah adanya UUPA, masyarakat Aceh sendiri dapat mendirikan partai politik lokal di Aceh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Pasal 1 angka 2 menyatakan: “partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota”.⁸

Partai politik lokal di Aceh baru terbentuk setelah adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pasal 75 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu tentang Partai politik lokal.⁹

Di mana dijelaskan bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua Puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Pasal 1 angka 2.

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia No.4633, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 75.

persen). Partai politik lokal didirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusannya. Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di Ibukota Aceh. Kepengurusan partai politik lokal memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

Kehadiran partai politik lokal (parlok) di Aceh mampu memberi warna tersendiri. Hal ini terbukti dari hasil pemilu di Aceh baik pelaksanaan pemilu di tahun 2009, kemudian pemilu tahun 2014 dan pada pemilu tahun 2019 partai lokal di Aceh dapat memenangkan pesta demokrasi. Walaupun jika penulis amati ada presentase penurunan perolehan suara dan kursi di Legislatif tingkat Provinsi.

TABEL 1.1.
Perolehan suara hasil pemilu tingkat Provinsi Aceh dari periode 2009 sampai pemilu 2019-2024.

Nama Parlok	Periode 2009-2014	Periode 2014-2019	Periode 2019-2024
PA	33 Kursi dari total 69 kursi	29 kursi dari total 81 Kursi	18 Kursi dari total 81 Kursi
PNA	Tidak ikut pemilu	3 kursi dari total 81 Kursi	6 kursi dari total 81 Kursi
PDA	1 Kursi dari total 69 kursi	1 Kursi dari total 81 kursi	3 kursi dari total 81 Kursi
SIRA	Tidak mendapatkan kursi	Tidak Ikut Pemilu	1 kursi dari total 81 Kursi

Berdasarkan gambaran di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan partai lokal masih dapat memenangkan pemilu sejak 2009 hingga 2019 yaitu Partai Aceh. Walaupun presentase perolehan

kursinya menurun. Kemudian ada peningkatan perolehan sura dari partai lokal lainnya seperti SIRA yang pemilu 2009 tidak memperoleh kursi, namun di pemilu 2019 mendapatkan 1 kursi. Sedangkan PNA dapat 6 kursi dan PDA meningkat 3 kursi. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan parlok di Aceh masih dibutuhkan oleh masyarakat Aceh.

Secara teori apabila kita lihat tujuan dari partai politik lokal itu dikategorikan menjadi tiga bagian sebagai berikut: *Pertama*, hak minoritas, partai politik lokal didirikan untuk melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu. *Kedua*, memperoleh Otonomi, partai politik lokal yang menginginkan untuk memperoleh otonomi bagi daerah mereka atau meningkatkan otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu. *Ketiga*, mencapai kemerdekaan, partai politik lokal yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah merdeka dan pembentukan negara baru. Tentunya point ketiga ini sudah dikunci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.¹⁰

Kemudian menurut hemat penulis, sebagai hipotesa awal penulis bahwa keberadaan partai lokal dan eksistensinya dapat dianggap lebih mampu untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang sangat penting bagi kemajuan masyarakat Aceh itu sendiri. Sehingga tujuan utama dari pada demokrasi yaitu dapat mengakomodir keseluruhan suara atau

¹⁰ Ilham Syahputra dan Ratih Baiduri, *Eksistensi Partai Politik Lokal Pada Era Otonomi Khusus Aceh*, Jurnal Antropologi Sumatera Vol. 16, No.1, Universitas Negeri Medan, Edisi Juni 2018, hlm. 3.

aspirasi rakyat. Termasuk golongan rakyat minoritas. Salah satu bukti peran partai lokal dapat mengikuti pesta demokrasi 2019. Di mana partai lokal yang lulus dan dinyatakan bisa mengikuti pesta demokrasi 2019 oleh lembaga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh diantaranya; Partai Aceh (PA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), dan Partai Daerah Aceh (PDA).¹¹

Keberadaan parlok tersebut menjadi peran penting dalam membangun keberlangsungan pilar-pilar demokrasi di wilayah Aceh pasca perdamaian *MoU-Helsinki* antara pihak eks GAM perjuangan rakyat Aceh dengan pihak Indonesia, maka peran parlok menjadi sangat penting bagi masyarakat Aceh agar aspirasi rakyat Aceh dapat tersalurkan dengan cara demokratis. Sehingga penulis merasa perlu mengkaji tentang peran partai lokal dalam kemajuan dan perkembangan demokrasi di wilayah Aceh, dengan judul **“Peran Parlok Dalam Memperkuat Sistem Demokrasi (Analisis Terhadap Keterwakilan Parlok Di Provinsi Aceh 2019)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana kedudukan dan peran partai politik lokal dalam menguatkan sistem demokrasi di Aceh?

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-3863036/4-parpol-lokal-aceh-lolos-verifikasi-dan-jadi-peserta-pemilu-2019>. di akses kembali pada tanggal 03 Februari 2020.

1.2.2. Bagaimana prospek ke depan partai politik lokal dalam membangun dan menyerap aspirasi dari masyarakat Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan peran partai politik lokal dalam menguatkan sistem demokrasi di Aceh.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana prospek ke depan partai politik lokal dalam membangun dan menyerap aspirasi dari masyarakat Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - Manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu diharapkan dapat memperkaya bahan dan khazanah keilmuan dalam bidang ilmu politik, ilmu sosial dan pemerintahan.
 - Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi akademik dalam perkembangan konsep dan teori ilmu politik dan pemerintahan.
2. Manfaat Praktis
 - Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat memberikan

informasi secara tertulis mengenai peran partai politik lokal dalam menguatkan sistem demokrasi di Indonesia.

- Setelah penelitian ini dilakukan penulis berharap nantinya menjadi referensi ilmiah yang berkaitan dengan ilmu politik terutama peran partai politik lokal dalam menguatkan sistem demokrasi. Serta dapat memberikan informasi bagi akademisi, peneliti dibidang politik, masyarakat, pemerintahan dan lainnya.

1.5. Literatur Review

Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini yang dapat membantu penulis. Diantaranya; Thesis yang ditulis oleh Fattaqun (2017) Mahasiswa Pasca Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul "*Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian DiNaggroe Aceh Darussalam*". Dimana penelitian ini lebih menitikberatkan pada mengetahui sejarah lahirnya partai politik lokal di Aceh serta mengetahui peran partai Aceh dalam mewujudkan perdamaian di Aceh. Hasil penelitian menjelaskan Partai Aceh merupakan bagian dari kompromi politik pemerintah pusat dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka dalam rangka menghasilkan perdamaian di provinsi Aceh. Dengan tujuan untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan pihak GAM. Keberhasilan mencapai langkah kompromi tersebut patut dihargai, mengingat penderitaan rakyat Aceh akibat kekerasan bersenjata yang terjadi selama puluhan tahun. Oleh karena itu langkah-langkah

kompromi yang tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga nama baik Republik Indonesia dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam penyelesaian konflik Aceh. Partai Lokalmewujudkan perdamaian di Aceh terutama Partai Aceh selaku partai mayoritas di DPRA.¹²

Kemudian jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 2, Nomor 2: 230-247 Juli 2017, yang ditulis oleh Feisal Akbar dan Mujibussalim, dengan judul “*Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Partai Daulat Aceh Pada Tahun 2009)*”. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat aceh terhadap PDA serta strategi PDA kedepan terkait eksistensinya sebagai partai politik lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap PDA dalam hal ini PDA perlu melakukan branding partai agar mendapatkan kepercayaan masyarakat, dan terobosan baru agar PDA dapat menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap partai tersebut. Adapun strategi PDA terkait eksistensinya sebagai partai politik lokal adalah membangun komitmen dalam mengawal proses pemilihan, Karena PDA mendapatkan banyak kecurangan di lapangan, PDA mengalami banyak kecolongan suara. Strategi lain yang digunakan PDA adalah melakukan rekrutmen yang sederhana

¹² Fattaqun, *Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Naggroe Aceh Darussalam*, Thesis, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

dan diplomatis, dimana kader yang direkrut ini pada umumnya adalah santri-santri dari dayah untuk mengajak generasi muda menjaga eksistensi keberlangsungan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.¹³

Kemudian jurnal JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Universitas Negeri Medan, Indonesia, Vol 5, No. 1 Tahun 2017, yang ditulis oleh Payerli Pasaribudengan judul “*Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*”. Di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik. Adapun hasil penelitian ini bahwa peranan partai politik menyalurkan pendapat aspirasi masyarakat dalam mengatur sedemikian rupa sehingga simpang siur pendapat dalam masyarakat berkurang. Partai politik memiliki suatu peranan penting dalam membentuk setiappartaiyang dijalankan setiap anggota-anggotanya. Sebaiknya partai politik lebih memperhatikan akan hal-hal apa-apa saja yang perlu dipenuhi dalam hal kepartaian serta melaksanakan tugasnya sebagai anggota partai politik dengan baik, apabila sudah duduk di salah satu kursi dewan. Partai politik lebih lagi meningkatkan kualitas keanggotaannya, baik dalam kedisiplinan maupun lain sebagainya, ini akan mempermudah dalam mencapai tujuan bersama. Meningkatkan kualitas keanggotaan tidak lah hanya berpatokan pada kaderisasi, namun harus melihat apa yang harus

¹³ Feisal Akbar dan Mujibussalim, *Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Partai Daulat Aceh Pada Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah FISIP Unsyiah, Volume 2, Nomor 2: 230-247 Juli 2017.

dicapai pada tujuan bersama, jangan hanya mementingkan kepentingan keanggotaan, namun mencapai tujuan bersama.¹⁴

Dari beberapa literatur penelitian di atas, terdapat perbedaan variabelnya dengan penelitian yang penulis kaji. Di mana penulis lebih memfokuskan pada bagaimana kedudukan dan peran partai politik lokal dalam menguatkan sistem demokrasi di Aceh serta bagaimana prospek ke depan partai politik lokal dalam membangun dan menyerap aspirasi dari masyarakat Aceh.



¹⁴ Payerli Pasaribu, *Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*, jurnal JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Universitas Negeri Medan, Indonesia, Vol 5, No. 1 Tahun 2017.